

DAFTAR BACAAN

- Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, cet. V, 1990.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penebit dan Balai Buku Ichjtir Jakarta, cet. VIII, 1985.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jilid I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- LP-POM MUI Jawa Timur, Buku Panduan Halal, Surabaya, 2000.
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Moh. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Philipus. Mandiri .Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, cet. III, Yogyakarta, 1995.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 85/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:924/MENKES /SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” Pada Label Makanan.